

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sampurasun

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai harapan. Sebagaimana kita ketahui, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek yaitu untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana kerja tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun, dimana Renja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta selama tahun 2025.



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan Itikad adalah Allah SWT. Semoga Itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 19 Juli 2024

Kepala

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Purwakarta,



AGUNG WAHYUDIPTO, MT., MM.

NIP. 19680911 199302 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35



3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3	Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		41
BAB V PENUTUP		42

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta	18
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Purwakarta	24
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Purwakarta	30
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta	40

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta	6



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu : fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan (*development function*), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), temasuk menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar, terminal dan lain-lain, serta pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakartamaka dibentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan administrasi umum pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Perubahan perkembangan akan mempengaruhi penataan ruang dan pengendalian pertumbuhan perumahan dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan adalah Dinas perumahan dan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, dan penataan kawasan, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek.

Sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah



merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

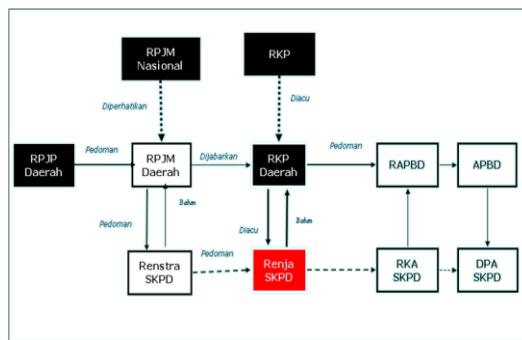
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Tahun 2025 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Di dalam Rencana Kerja tahun 2025 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapainya pada tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup, prinsip dan pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya yaitu; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renja Prangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan tentunya antara semua dokumen perencanaan tersebut saling terkait. Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Kedudukan rencana kerja perangkat daerah

Salah satu hal penting yang diatur dalam pedoman tersebut, bahwa setiap tahun Rencana Kerja (Renja) harus disusun dengan mengacu kepada Renstra. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

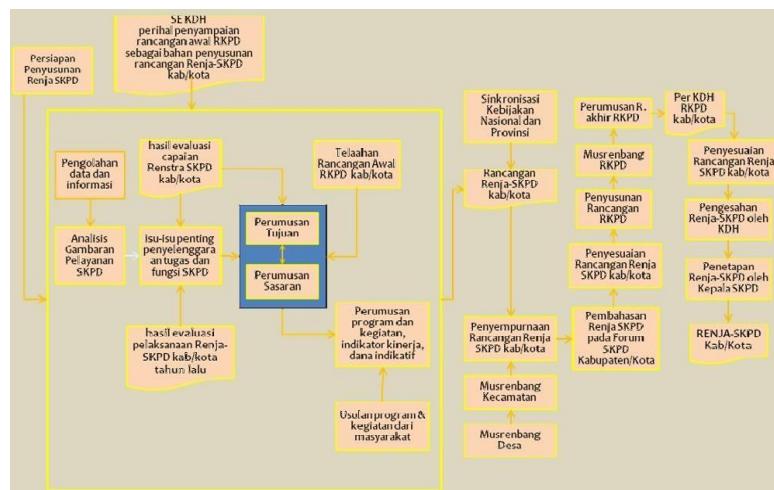
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, guna mewujudkan terlaksananya otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Berikut ini adalah bagan alir penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta dapat tergambar pada bagan berikut:



Gambar 1.2 Bagan alir penyusunan rencana kerja tahun 2025



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



-
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang telah mengakomodir usulan hasil Musyawarah Rencana



Pembangunan dari setiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan RPJMD Kabupaten Purwakarta.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penyusunan.

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capain tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, meliputi:



- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025, meliputi :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah penyusunan rencana kerja dan pendanaan.

BAB V: Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dan kegiatan yang selama ini telah dijalankan. Evaluasi adalah penilaian yang terencana untuk mengetahui hasil atau efektivitas dari suatu program yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan – penyimpangan dari rencana pembangunan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat melalui penetapan indikator kinerja. Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara program yang sudah dilakukan perangkat daerah dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem tata pemerintahan, evaluasi merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah program kegiatan yang digunakan selama ini telah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025



Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100%	96%	100%	96%	96%	100%	97%	97%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Persentase)	61,00							
		Persentase penduduk berakses air minum (Persentase)	95,00							
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelaanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (Persentase)	80,00							
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Persentase)	1,00							
		Tingkat jaringan SPAM yang dibangun (Persentase)	97,00							
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	96%	100%	96%	96%	100%	97%	97%
		Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Persentase)	80							
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Persentase)	69,00							

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

		Persentase rumah tinggal bersanitasi (Persentase)	82,00							
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (Persentase)	1,00							
		Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki (Persentase)	81,00							
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik (Persentase)	82								
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100%	96%	100%	90%	90%	100%	95%	95%	
	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki (Persentase)	2,00								
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	96%	100%	90%	90%	100%	95%	95%	
	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki (Persentase)	2,00								
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	100%	96%	100%	97%	97%	100%	98%	98%	
	Persentase areal kawasan kumuh (Persentase)	8,00								
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (poin)	8,00								
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	96%	100%	97%	97%	100%	98%	98%	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam penanaman pohon (Paket)	1								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	95%	100%	95%	95%	100%	97%	97%	
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A								
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Dokumen)	7								
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	90%	100%	86%	86%	100%	92%	92%	
	Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan(Dokumen)	7								
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah dokumen dan laporan administrasi penyusunan barang milik daerah (Dokumen)	7								
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	92%	100%	99%	99%	100%	97%	97%	
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Persentase)	78								
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	
	Jumlah laporan capaian SAKIP Perangkat Daerah (Laporan)	3								

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99%	100%	99%	99%	100%	99%	99%
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan daerah (Unit)	5							
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93%	100%	96%	96%	100%	96%	96%
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	12							
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97%	100%	82%	82%	100%	93%	93%
	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Unit)	19							
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Persentase)	38,00							
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)	9,00							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persentase)	48,00							
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	38							
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	38							
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	9							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persentase)	48							
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100%	100%	100%	98%	98%	100%	99%	99%
	Rasio rumah layak huni (%)	8,00							
	Rasio permukiman layak huni(%)	30,00							
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Persentase)	96,00							
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Persentase)	92,00							
	Persentase pemukiman yang tertata (Persentase)	18,00							
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%
	Luas kawasan kumuh yang ditangani sesuai dengan surat keputusan (Ha)	5							
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	100%	100%	97%	97%	100%	99%	99%
	Penyedian dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Persentase)	62							

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman****Kabupaten Purwakarta Tahun 2025**

1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100%	86%	100%	90%	90%	100%	92%	92%
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Persentase)	3,00							
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Persentase)	3,00							
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	86%	100%	90%	90%	100%	92%	92%
	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Paket)	5							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 telah ditetapkan indikator kinerja yang diantaranya termasuk indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut telah menggambarkan gambaran kinerja pelayanan yang hendak dicapai dalam satu tahun kedepan sejalan dengan RKPD Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, ditetapkan 12 (dua belas) program dengan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
2. Persentase penduduk berakses air minum
3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan



4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
5. Tingkat jaringan SPAM yang dibangun

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
4. Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki

C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Tingkat Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan yang dibangun/Diperbaiki

D. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Persentase areal kawasan kumuh
2. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

F. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
2. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
3. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni



7. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Rasio rumah layak huni
2. Rasio permukiman layak huni
3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
5. Persentase pemukiman yang tertata

8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
2. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana

9. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

REGIONAL

1. Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia
2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

10. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh

11. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

1. Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN

1. Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

13. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

1. Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

**Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025	2026	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	IKK 1 Urusan Pekerjaan Umum - Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	100%	100%	81%	96%	96%	81%	82%	
2	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia	-	0	0	0	9%	0	0	9%	10%	
3	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	0	0	0	59.688,45%	0	0	59.688,45%	61%	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Persentase)	IKK 2 Urusan Pekerjaan Umum - Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Persentase)		100%	100%	100%	70%	100%	100%	70%	71%	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

6	Persentase rumah tinggal bersanitasi (Persentase)		100%	100%	100%	83%	100%	100%	83%	84%	
7	Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki (Persentase)		100%	100%	100%	82%	100%	100%	82%	83%	
8	Tingkat Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki (Persentase)		100%	100%	100%	2%	90%	90%	2%	3%	
9	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)	IKK 1 Urusan Perumahan Rakyat - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	10%	0%	0%	10%	11%	
10	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persentase)		100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
11	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
12	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		100%	100%	100%	39%	0%	0%	39%	40%	
13	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Persentase)		100%	100%	100%	97%	98%	98%	97%	98%	
14	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)		100%	100%	100%	93%	98%	98%	93%	94%	
15	Persentase pemukiman yang tertata (Persentase)	IKK 3 Urusan Perumahan Rakyat - Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/	100%	100%	100%	19%	98%	98%	19%	20%	
16	Rasio permukiman layak huni		100%	100%	100%	40%	98%	98%	40%	41%	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

17	Rasio rumah layak huni(%)	kota yang ditangani	100%	100%	100%	8%	98%	98%	8%	9%	
18	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki		100%	100%	100%	5 Unit Rumah	0%	0%	5 Unit Rumah	10 Unit Rumah	
19	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	IKK 5 Urusan Perumahan Rakyat - Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	3%	90%	90%	3%	4%	
20	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Persentase)	IKK 5 Urusan Perumahan Rakyat - Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	3%	90%	90%	3%	4%	
21	Tersedianya penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		0	0	0	10 Dokumen	0	0	10 Dokumen	15 Dokumen	
22	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	2 Dokumen	
23	Tersedianya laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi		0	0	0	5 Laporan	0	0	5 Laporan	6 Laporan	
24	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas dan fungsi serta berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program prioritas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan juga dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat memperhatikan dan berangkat dari isu-isu penting di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang :

Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan infrastruktur wilayah tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha.
- Tidak berimbangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
- Pesatnya pertumbuhan pemanfaatan ruang untuk aktivitas budidaya non pertanian dan kehutanan.
- Tidak seimbangnya perkembangan antar bagian wilayah.

Untuk lebih jelasnya, maka isu-isu penting di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jalan Lingkungan

Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur Wilayah. Belum meratanya dukungan infrastruktur wilayah jaringan jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah terpencil, faktor utamanya berasal dari keterbatasan



kemampuan pembiayaan. Pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pendapatan asli daerah yang sedang dilaksanakan pada saat ini belum mampu mengangkat keterpurukan daerah dalam hal anggaran, sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.

b. Air Bersih

- Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat.

Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta .

- Kapasitas air baku dan pelayanan air bersih perpipaan masih terbatas Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta khususnya di perkotaan. Sedangkan penyediaan air bersih untuk pedesaan menggunakan sumber mata air yang ada yang dikelola oleh warga masyarakat dengan bantuan pengadaan instalasi dan distribusinya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- Masih terdapat daerah rawan air bersih terutama pada musim kemarau

c. Drainase :

- Masih terdapat banyak daerah genangan terutama di kawasan perkotaan. Sampai saat ini diwilayah perkotaan masih terdapat beberapa titik genangan yang harus segera diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur drainase perkotaan yang perlu perbaikan.
- Belum optimalnya penanganan drainase secara baik dan berwawasan lingkungan.



- Belum optimalnya penanganan drainase karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap penanganan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.
- Tidak berfungsinya saluran drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase.

2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Tingginya *back log* penyediaan rumah tinggal.
- Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk tempat tinggal yang layak.
- Meningkatnya lingkungan permukiman padat/kumuh.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dasar permukiman.
- Kurang optimalnya pengelolaan dan penataan taman pemakaman umum (TPU) di Kabupaten purwakarta
- Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau, khususnya di perkotaan akibat banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, industri dan perniagaan.
- Kurangnya pemerataan pemasangan jaringan PJU, khususnya di desa-desa dan belum optimalnya pemeliharaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Sarana Prasarana Dasar Perumahan

- Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan. Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.
- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya perijinan untuk pembangunan perumahan menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (*pass-through*) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Salah satu tahapan proses penyusunan rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa temuan dan catatan penting. Temuan dan catatan penting tersebut berupa perbedaan hasil analisis dengan rancangan awal RKPD. Beberapa poin penting yakni adanya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD serta program dan kegiatan cocok tetapi besaran pagu anggaran berbeda. Maka dari itu, poin-poin tersebut dituangkan ke dalam rancangan akhir. Penalaahan terkait rancangan akhir RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada table T-C.31.

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	4	8	9	1	3	4	8	9
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		36.967.746.307,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		36.967.746.307,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		21.890.000.000,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		21.890.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		9.150.000.000,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		9.150.000.000,00	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	500.000.000,00	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	500.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81 Persen	500.000.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81 Persen	500.000.000,00
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Lembaga	50.000.000,00			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Lembaga	50.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Orang	0,00			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Orang	0,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	50.000.000,00	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	21 Liter/Detik	50.000.000,00			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	21 Liter/Detik	50.000.000,00	
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa					Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa			
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Desa	50.000.000,00			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Desa	50.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12 Liter/Detik	50.000.000,00			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12 Liter/Detik	50.000.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
	-	-	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	0,00			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	0,00	

	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	-	-	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17 SR	50.000.000,00			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17 SR	50.000.000,00	
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	50.000.000,00			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	50.000.000,00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	7.100.000.000,00	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	7.100.000.000,00
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	9 Persen 59.688,45 Persen	7.100.000.000,00		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	9 Persen 59.688,45 Persen	7.100.000.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	5 Unit	500.000.000,00			Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	5 Unit	500.000.000,00	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	28.17 Ton/hari	4.800.000.000,00			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	28.17 Ton/hari	4.800.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan			
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	50 Orang	200.000.000,00			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	50 Orang	200.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			
	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	100.000.000,00			Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	100.000.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	1.000.000.000,00			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	1.000.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,00			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	850.000.000,00	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	850.000.000,00
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase rumah tinggal bersanitasi Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	100 Persen 70 Persen 83 Persen 82 Persen	850.000.000,00			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase rumah tinggal bersanitasi Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	100 Persen 70 Persen 83 Persen 82 Persen	850.000.000,00	

Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	50.000.000,00
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	1 M ³ /Hari	50.000.000,00
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	1 M ³ /Hari	50.000.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M ³ /Hari	50.000.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	1 M ³ /Hari	50.000.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1 M ³ /Hari	0,00		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1 M ³ /Hari	0,00
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	1 M ³ /Hari	50.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	0 M ³ /Hari	0,00		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	0 M ³ /Hari	0,00
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 Unit	50.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	4 M ³ /Hari	50.000.000,00		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	4 M ³ /Hari	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1 Rumah Tangga	50.000.000,00		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1 Rumah Tangga	50.000.000,00
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa			
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17 Desa	50.000.000,00		Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17 Desa	50.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	50.000.000,00		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	50.000.000,00
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			

	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M ³ /Hari	50.000.000,00		
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00		
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	2000 Rumah Tangga	50.000.000,00		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	2000 Rumah Tangga	50.000.000,00		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 Orang	50.000.000,00		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 Orang	50.000.000,00		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00		
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	700.000.000,00	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	700.000.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	2 Persen	700.000.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	2 Persen	700.000.000,00
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5 M	50.000.000,00		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5 M	50.000.000,00		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan				
	-	-	50.000.000,00		-	-	-	50.000.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Meter	50.000.000,00		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Meter	50.000.000,00		
	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	5 M	50.000.000,00		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	5 M	50.000.000,00		
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00		
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				
	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00		

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			
	-	-	50.000.000,00		-	-	-	50.000.000,00
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan			
	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan				Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan			
	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	50.000.000,00		Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	50.000.000,00	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			
	-	-	50.000.000,00		-	-	-	50.000.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	850.000.000,00	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	850.000.000,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000,00
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			

	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000,00
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator					Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			
	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	10 Orang	50.000.000,00			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	10 Orang	50.000.000,00
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	-	-	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan					Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	1 Orang	50.000.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	1 Orang	50.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	10 Persen 100 Persen 100 Persen 39 Persen	350.000.000,00		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	10 Persen 100 Persen 100 Persen 39 Persen	350.000.000,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	11 Unit Rumah	50.000.000,00			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	11 Unit Rumah	50.000.000,00
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	50.000.000,00			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	50.000.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota					Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	50.000.000,00			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	50.000.000,00
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	50.000.000,00			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	50.000.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	-	-	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	50.000.000,00			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	50.000.000,00

	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	50.000.000,00			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	50.000.000,00	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	50.000.000,00			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	50.000.000,00	
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	8.740.000.000,00	6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	8.740.000.000,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	7.990.000.000,00		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	7.990.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	7.990.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	7.990.000.000,00	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Percentase pemukiman yang tertata Rasio permukiman layak huni Rasio rumah layak huni	97 Persen 93 Persen 19 Persen 40 Persen 8 Persen	250.000.000,00		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Percentase pemukiman yang tertata Rasio permukiman layak huni Rasio rumah layak huni	97 Persen 93 Persen 19 Persen 40 Persen 8 Persen	250.000.000,00	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	50.000.000,00	
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha					Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	50.000.000,00	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha					Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha				
	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Rumah Tangga	50.000.000,00			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Rumah Tangga	50.000.000,00	
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				
	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				

	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	500.000.000,00		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	500.000.000,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		11 Unit Rumah	50.000.000,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		11 Unit Rumah	50.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	50.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	50.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000,00
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2 Ha	150.000.000,00			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2 Ha	150.000.000,00
	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh			
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1 Ha	100.000.000,00			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1 Ha	100.000.000,00
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	50.000.000,00			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	50.000.000,00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	50.000.000,00			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	50.000.000,00
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	250.000.000,00	7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	250.000.000,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	250.000.000,00		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	50.000.000,00			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	50.000.000,00
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			

	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	50.000.000,00		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	50.000.000,00	
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh			
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh			
	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Rumah Tangga	50.000.000,00		Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Rumah Tangga	50.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			
	-	-	50.000.000,00		-	-	50.000.000,00	
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	2.900.000.000,00	8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	2.900.000.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	3 Persen 3 Persen	2.900.000.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	3 Persen 3 Persen	2.900.000.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	450.000.000,00		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	450.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	450.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	450.000.000,00	
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	650.000.000,00		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	650.000.000,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			
	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	18 Lokasi	450.000.000,00		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	18 Lokasi	450.000.000,00	
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	2 Dokumen	450.000.000,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	2 Dokumen	450.000.000,00	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 Laporan	450.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 Laporan	450.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		150.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		150.000.000,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			150.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			150.000.000,00
9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	50.000.000,00	9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	50.000.000,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000,00		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000,00
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000,00
10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	50.000.000,00	10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	50.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	50.000.000,00	11	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	50.000.000,00
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	5 Laporan	50.000.000,00		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	5 Laporan	50.000.000,00
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			
		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	5 Laporan	50.000.000,00			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	5 Laporan	50.000.000,00
	NON URUSAN			14.927.746.307,00		NON URUSAN			14.927.746.307,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.927.746.307,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.927.746.307,00
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.927.746.307,00	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.927.746.307,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	100 Persen	198.000.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	100 Persen	198.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.000.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	40.000.000,00			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	40.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	20.000.000,00			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	20.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	25.000.000,00			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	25.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.000.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen keuangan	100 Persen	6.674.075.313,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen keuangan	100 Persen	6.674.075.313,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	6.609.075.313,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	6.609.075.313,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	15.000.000,00			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	15.000.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	15.000.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	15.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	15.000.000,00			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	15.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			

	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	79 Persen	105.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	79 Persen	105.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	50.000.000,00			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	50.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	5.000.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	5.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	575.000.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	575.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	50.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.000.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	80.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	80.000.000,00
Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50.000.000,00			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.746.566.153,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.746.566.153,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.466.566.153,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.466.566.153,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.539.104.841,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.539.104.841,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	175.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	175.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.250.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.250.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.104.841,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.104.841,00



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan akhir RKPD memuat usulan program/kegiatan pemangku kepentingan. Usulan tersebut diperoleh dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan publik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Selain itu, usulan juga didapatkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, dan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari observasi lapangan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dengan beberapa kecamatan di kabupaten Purwakarta menghasilkan usulan atau aspirasi masyarakat. Usulan rancangan akhir RKPD ditujukan pada Tabel T-C.32.

T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	81	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			PersentaseTPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia (%)	9	
			Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	59.688,45	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Percentase)	70	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Tingkat Saluran Drainase Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki (%)	2	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam penebangan pohon (Paket)	1	
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Dokumen)	97	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman****Kabupaten Purwakarta Tahun 2025**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan (Dokumen)	11	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah dokumen dan laporan administrasi penyusunan barang milik daerah (Dokumen)	7	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta			
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Persentase)	78	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah laporan capaian SAKIP Perangkat Daerah (Laporan)	3	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan daerah (Unit)	5	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta			
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Unit)	19	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman****Kabupaten Purwakarta Tahun 2025**

7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Persentase)	38	
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Persentase)	38	
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)	9	
			Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persentase)	48	
8	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Tersedianya Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit Rumah)	5	
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Purwakarta			
			Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Paket)	5	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman****Kabupaten Purwakarta Tahun 2025**

10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta			
			Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	
12	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Purwakarta	Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan)	5	



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratas dengan baik. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025, tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta adalah:

**“Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
yang Profesional”**

Arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 yang tertuang pada RPD tahun 2025 memuat 8 (delapan) pokok, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
7. Reformasi Birokrasi
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Arah kebijakan yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya yakni meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata, mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkar timur dan lingkar barat, meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan, memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat, meningkatkan ketataan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, meningkatkan penyediaan rumah layak huni, revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan, dan meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan tema pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas, Prioritas Pembangunan daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM



5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta yaitu “Terwujudnya perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tertata, berwawasan lingkungan”. Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta yaitu mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman, perkotaan, perdesaan, kawasan kumuh dalam; mewujudkan perumahan yang layak dan sehat, meningkatkan kualitas Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat; dan meningkatkan perbaikan/pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, sehat, dan merata.

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam



operasional organisasi. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026 adalah memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan dan penataan wilayah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 yakni meningkatnya infrastruktur konektivitas antar wilayah, meningkatnya pengelolaan infrastruktur yang strategis dan efisien, dan meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berpedoman kepada rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi, strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 yaitu meningkatkan ketersediaan akses jaringan air bersih yang merata, meningkatkan pengelolaan prasarana dan sarana umum, ekonomi, permukiman, dan pemerintahan yang merata, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui strategi tersebut harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat guna mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1. Meningkatkan ketersediaan anggaran dan sarana serta prasarana aparatur dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan ketersediaan anggaran dan memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat aparatur serta pemberian motivasi kerja
3. Meningkatkan kualitas informasi sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD



4. Mempertahankan kualitas taman, jalur hijau, dan ornamen kota
5. Meningkatkan jumlah lampu hias pada ruang publik dan jalur perlintasan strategis
6. Membangun dan memperbaiki jalan lingkungan
7. Membangun dan memperbaiki sistem drainase lingkungan
8. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengolahan limbah
9. Meningkatkan luasan TPU yang dikelola pemda
10. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan dan memelihara sarana prasarana lingkungan
11. Memfasilitasi penyediaan dan perbaikan tempat tinggal bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
12. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana air bersih komunal dan perpipaan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta mengacu pada visi Bupati Purwakarta yaitu “Purwakarta cerdas, sehat, dan berakhhlakul karimah”. Pembangunan di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan urusan wajib Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan program-program prioritas. Program-program tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan guna mendukung pencapaian program-program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan ditunjukkan pada table T-C.33.

Tabel T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sarasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					36.967.746.307,00								48.892.203.454,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.890.000.000,00								33.588.290.952,00			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMMUM DAN PENATAAN RUANG					9.150.000.000,00								20.392.940.952,00			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	500.000.000,00							-	609.000.000,00			
1	03	03	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	81 Persen	500.000.000,00							Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat	-	609.000.000,00	
1	03	03	2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya		2 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		2 Orang	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		21 Liter/Detik	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		2 Desa	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		12 Liter/Detik	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun									Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

					-				-	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama			1 Unit	0,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-			-	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			17 SR	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-		-	7.100.000.000,00						-	7.206.500.000,00	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Percentase TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang tersedia Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	9 Persen 59.688,45 Persen	7.100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat	-	7.206.500.000,00		
1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama			5 Unit	500.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		507.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun			28.17 Ton/hari	4.800.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		4.872.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan			50 Orang	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		203.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		12.121.440.952,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01	0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan					Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Konektivitas Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.740.000.000,00						13.195.350.000,00		
5	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	-	850.000.000,00					-	755.750.000,00		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	250.000.000,00			-	-	-	50.250.000,00		
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			-	150.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	150.750.000,00		
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih			10 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.02	0008	Rimbug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-			-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan			1 Orang	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah			1 Rumah Tangga	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-		50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	8.740.000.000,00				-	-	9.244.850.000,00		
	1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	-	7.990.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	-	8.109.850.000,00	
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1 Laporan	7.990.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-		8.109.850.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Persentase pemukiman yang tertata Rasio pemukiman layak huni Rasio rumah layak huni	-	97 Persen 93 Persen 19 Persen 40 Persen 8 Persen	250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat	-	353.750.000,00	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha		1 Rumah Tangga	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		1 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		50.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

					Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyedian/Pengelolaan PSU Perumahan				2 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat		456.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			2 Laporan	450.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat		456.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	150.000.000,00										152.250.000,00		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	150.000.000,00										152.250.000,00		
9	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-			-	50.000.000,00					-	50.750.000,00		
	2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		10 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat	-	50.750.000,00	
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat		50.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-			-	50.000.000,00					-	50.750.000,00		
	2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	50.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	50.750.000,00	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	-	50.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-			-	50.000.000,00					-	50.750.000,00		
	2	10	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	-		5 Laporan	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat	-	50.750.000,00	
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.			5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat		50.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X					NON URUSAN	14.927.746.307,00										15.151.662.502,00		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	14.927.746.307,00										15.151.662.502,00		
12	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	14.927.746.307,00					-	15.151.662.502,00		

	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	-			100 Persen	198.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat	-	200.970.000,00	
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		40.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		40.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		25.375.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		5.075.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		20.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		25.375.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	43.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		43.645.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen keuangan	-		100 Persen	6.674.075.313,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat	-	6.774.186.443,00	

					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		20.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		76.125.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		50.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		81.200.000,00	
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		50.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		10.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		10.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemeraataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		5.832.764.645,00	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	4.104.841,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Masyarakat		4.166.414,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							J U M L A H	36.967.746.307,00									48.892.203.454,00	



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penggerahan semua sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel T-C.33 yang memuat uraian urusan, organisasi, program, dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, sumber dana, rencana kerja tahun 2025 yang terdiri dari lokasi, target capaian, dan pagu indikatif. Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khusus untuk kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dana berasal dari DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler dan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berasal dari Dana Perimbangan.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
2. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
5. Program pengembangan permukiman



-
6. Program kawasan permukiman
 7. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 9. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
 10. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
 11. Program pengelolaan tanah kosong
 12. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Purwakarta, target, dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta. Rencana kerja tersebut sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah. Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta lebih terkoordinasi, terintegrasi, terarah, sinergis, dan berkelanjutan baik dalam



lingkungan internal perangkat daerah maupun dengan SKPD lain yang terkait dalam hal pencapaian visi dan misi Bupati Purwakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, sejalan dengan eskalasi permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman yang terus berkembang maka perlu ditetapkan program-program prioritas, dan pada tahun anggaran 2025 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
2. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
5. Program pengembangan permukiman
6. Program kawasan permukiman
7. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
9. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
10. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
11. Program pengelolaan tanah kosong
12. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program prioritas tersebut merupakan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan



Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dan upaya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Purwakarta. Kaidah Pelaksanaan disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2025.